

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI UNSUR MELAWAN
HUKUM DALAM PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 jo. UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera
Barat Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A)**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum*



**NAMA : ANGGA PRATAMA
NIM : 1920112058**

Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H. (Ketua Pembimbing)

Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn. (Anggota Pembimbing)

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI UNSUR MELAWAN
HUKUM DALAM PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1999 JO. UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Barat Pada Pengadilan
Negeri Padang Kelas 1A)**

**(Angga Pratama S.H, NIM. 1920112058, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum , Universitas Andalas, Halaman 110, Tahun 2023)**

ABSTRAK

Unsur melawan hukum pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian secara formil dan materil sehingga dalam menentukan seseorang memenuhi unsur melawan hukum pada Pasal 2 UU (PTPK) tersebut memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Maka oleh sebab itu penelitian ini akan mengkaji mengenai Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Padang. Dengan emnagngkat permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, dasar yang digunakan Hakim dalam Pertimbangannya Untuk Menentukan Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Memenuhi “Unsur Melawan Hukum” Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Padang. *Kedua*, Pandangan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Barat Pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A terhadap “Unsur melawan hukum formil” dalam beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil dari penelitian yaitu unsur melawan hukum secara materil tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sedangkan secara formil unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi masih memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dipahami bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana jika perbuatan seseorang melanggar peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative atau studi kepustakaan dengan dibantu wawancara sebagai data pendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang konkret tentang penafsiran unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : *Tindak Pidana Korupsi, Melawan Hukum, Pertimbangan Hakim*

**ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS REGARDING THE ELEMENT
OF AGAINST THE LAW IN ARTICLE 2 PARAGRAPH (1) OF LAW
NUMBER 31 YEAR 1999 JO. 1999 JO. LAW NUMBER 20 OF 2001
REGARDING THE ERADICATION OF CORRUPTION
(Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sumatera Barat Pada Pengadilan
Negeri Padang Kelas 1A)**

**(Angga Pratama S.H, NIM. 1920112058, Masters Program In Law, Faculty Of Law,
Andalas University, Halaman 110 Page, 2023)**

ABSTRACT

The element against the law in Article 2 Paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 concerning the Eradication of the Crime of Corruption has a formal and material understanding so that in determining a person fulfills the element against the law in Article 2 of the Law (PTPK) has different interpretations. Therefore, this research will examine the Analysis of Judges' Considerations Regarding the Elements of Unlawfulness in Article 2 Paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 concerning the Eradication of the Crime of Corruption Study at the Padang District Court of Corruption. With the following problems: First, the basis used by the judge in his consideration to determine whether the defendant of the crime of corruption has fulfilled the "elements against the law" based on Article 2 paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of the Crime of Corruption in the Padang District Court of Corruption. Second, the view of judges in the West Sumatra Corruption Court at the Padang District Court Class 1A on the "Element against the formal law" in several cases of Corruption charged with Article 2 paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of the Crime of Corruption. The result of the research is that the material unlawful element no longer has binding legal force while formally the unlawful element in the crime of corruption still has binding legal force, which is understood that a person can be sentenced to punishment if a person's actions violate the laws and regulations. The research method used is normative research or literature study with the help of interviews as supporting data. This research is descriptive analysis because this research is expected to provide a concrete picture of the interpretation of the element against the law in Article 2 paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 concerning Eradication of Corruption.

Keywords: Corruption Crime, Against the Law, Judge's Consideration